

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
PENDAHULUAN	1
BAB I BIROKRASI WEBERIAN, BIROKRATISASI, DAN KINERJA.....	8
1.1 Pendahuluan	8
1.2 Konsep Birokrasi Weberian.....	10
1.3 Kritik terhadap Birokrasi Weberian	13
1.4 Pro dan Kontra terhadap Model Birokrasi Weberian	18
1.4.1 Formalisasi Aturan dan Prosedur.....	19
1.4.2 Hierarki yang Panjang	20
1.4.3 Spesialisasi Kerja.....	22
1.4.4 Impersonalitas.....	23
1.5 Titik Optimalitas Birokratisasi	24
1.6 Debirokratisasi atau Birokratisasi?	30
1.6.1 Misi yang Diemban Birokrasi.....	31
1.6.2 Karakteristik Lingkungan Birokrasi	33
1.6.3 Profesionalitas Aparat Birokrasi	34
1.6.4 Besaran Organisasi.....	35
1.6.5 Kualitas Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	35
1.7 Kesimpulan	37

BAB II	PATOLOGI BIROKRASI: SEBAB DAN IMPLIKASINYA BAGI KINERJA BIROKRASI PUBLIK.....	39
2.1	Patologi Birokrasi.....	39
2.2	Birokrasi Paternalistik.....	44
2.3	Pembengkakan Anggaran.....	52
2.4	Prosedur yang Berlebihan	58
2.5	Pembengkakan Birokrasi	67
2.6	Fragmentasi Birokrasi	75
2.7	Kebijakan Pembangunan Birokrasi.....	84
BAB III	VISI PEMBANGUNAN BIROKRASI DI INDONESIA.....	93
3.1	Reformasi Birokrasi di Persimpangan Jalan	98
3.2	Visi Reformasi Birokrasi?	107
3.3	Sosok Birokrasi dan Pegawai ASN yang diinginkan	108
3.3.1	Peduli	108
3.3.2	Unggul	111
3.3.3	Transformatif.....	114
3.3.4	Profesional	117
3.3.5	Memiliki Integritas	119
3.3.6	Memiliki Visi Kebaruan.....	121
3.3.7	Agen <i>Democratic Governance</i>	124
3.4	Peta Jalan Reformasi Birokrasi	126
3.4.1	Penguatan Basis Legal untuk Pelembagaan Reformasi Birokrasi.....	126
3.4.2	Penataan Kembali Struktur Kelembagaan Birokrasi	131
3.4.3	Reformasi Manajemen ASN.....	140
3.4.4	Membangun Budaya Baru dan Jati Diri Birokrasi	147
3.4.5	Peningkatan Akuntabilitas Publik	150
3.5	Penutup.....	153
BAB IV	REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN KORUPSI DI INDONESIA	157
4.1	Pendahuluan	157
4.2	Mengapa Reformasi Birokrasi?.....	161
4.3	Restrukturisasi Kelembagaan	166
4.4	Akuntabilitas Tanggung renteng	171
4.5	Redefinisi Peran Birokrasi.....	177
4.6	Membangun Birokrasi yang Transparan	181

4.7	Pengendalian Penggunaan Diskresi	186
4.8	Penutup.....	188
BAB V	REFORMASI APARATUR DAERAH UNTUK KEBERHASILAN DESENTRALISASI DI INDONESIA	191
5.1	Desentralisasi Tanpa Reformasi Aparatur Daerah: Paradoks dan Anomali?.....	191
5.2	Reformasi Tata Pemerintahan Daerah yang Koheren dan Terintegrasi.....	197
5.2.1	Pembagian Urusan	203
5.2.2	Ukuran dan Distribusi Aparatur	209
5.2.3	Pengembangan Sistem Insentif.....	212
5.2.4	Fleksibilitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya... ..	213
5.2.5	Akuntabilitas Aparatur Daerah	214
5.3	Agenda Reformasi Pengelolaan Aparatur Daerah	220
5.3.1	Kewenangan Menentukan Besaran, Komposisi, dan Kompetensi Aparatur Daerah.....	221
5.3.2	Memperjelas Lokus Akuntabilitas Aparatur Daerah.....	222
5.3.3	Peningkatan Mobilitas Aparatur Daerah.....	223
5.3.4	Pengembangan Sistem Insentif Berbasis Kinerja	224
5.3.5	Pengembangan Sistem Merit Berbasis Jabatan	226
BAB VI	MENGELOLA KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI	228
6.1	Memanfaatkan Kesempatan Emas	228
6.2	Membangun Persepsi yang Sama tentang Reformasi Birokrasi	233
6.3	Pusat Pengembangan dan Pengendali Kebijakan Reformasi Birokrasi.....	244
6.4	Manajemen Perubahan	251
6.5	Monitoring, Evaluasi, dan Pengelolaan Pengetahuan	258
6.6	Kesimpulan	266
BAB VII	REFORMASI BIROKRASI KONTEKSTUAL: FOKUS, INKLUSIF, DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN PUBLIK.....	269
7.1	Menata ulang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	269
7.2	Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah.....	279
7.3	Mempercepat Profesionalisasi Pegawai ASN	282
7.4	Membentuk Sekolah Kader dan Mereformasi Sekolah Kedinasan.....	285

7.5	Membentuk budaya pelayan	289
7.6	Reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan korupsi	292
7.7	Memperkuat <i>alignment</i> modalitas reformasi birokrasi....	293
7.8	Kesimpulan	294

DAFTAR PUSTAKA.....	298
MEDIA MASSA	307

289	7.5	Membentuk budaya pelayan
292	7.6	Reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan korupsi
293	7.7	Memperkuat <i>alignment</i> modalitas reformasi birokrasi....
294	7.8	Kesimpulan
298	DAFTAR PUSTAKA.....	
307	MEDIA MASSA	
311	2.3.1	Kewenangan Menentukan Kebijakan Komposisi dan Kompetensi Aparatur
312	2.3.2	Memperluas Lokasi Akuntabilitas Aparatur
313	2.3.3	Profil dan Struktur Aparatur
314	2.3.4	Perencanaan dan Pengendalian
315	2.3.5	Pengembangan Sistem
316	2.3.6	Pengembangan Sistem
317	2.3.7	Pengembangan Sistem
318	2.3.8	Pengembangan Sistem
319	2.3.9	Pengembangan Sistem
320	2.3.10	Pengembangan Sistem
321	2.3.11	Pengembangan Sistem
322	2.3.12	Pengembangan Sistem
323	2.3.13	Pengembangan Sistem
324	2.3.14	Pengembangan Sistem
325	2.3.15	Pengembangan Sistem
326	2.3.16	Pengembangan Sistem
327	2.3.17	Pengembangan Sistem
328	2.3.18	Pengembangan Sistem
329	2.3.19	Pengembangan Sistem
330	2.3.20	Pengembangan Sistem
331	2.3.21	Pengembangan Sistem
332	2.3.22	Pengembangan Sistem
333	2.3.23	Pengembangan Sistem
334	2.3.24	Pengembangan Sistem
335	2.3.25	Pengembangan Sistem
336	2.3.26	Pengembangan Sistem
337	2.3.27	Pengembangan Sistem
338	2.3.28	Pengembangan Sistem
339	2.3.29	Pengembangan Sistem
340	2.3.30	Pengembangan Sistem
341	2.3.31	Pengembangan Sistem
342	2.3.32	Pengembangan Sistem
343	2.3.33	Pengembangan Sistem
344	2.3.34	Pengembangan Sistem
345	2.3.35	Pengembangan Sistem
346	2.3.36	Pengembangan Sistem
347	2.3.37	Pengembangan Sistem
348	2.3.38	Pengembangan Sistem
349	2.3.39	Pengembangan Sistem
350	2.3.40	Pengembangan Sistem
351	2.3.41	Pengembangan Sistem
352	2.3.42	Pengembangan Sistem
353	2.3.43	Pengembangan Sistem
354	2.3.44	Pengembangan Sistem
355	2.3.45	Pengembangan Sistem
356	2.3.46	Pengembangan Sistem
357	2.3.47	Pengembangan Sistem
358	2.3.48	Pengembangan Sistem
359	2.3.49	Pengembangan Sistem
360	2.3.50	Pengembangan Sistem
361	2.3.51	Pengembangan Sistem
362	2.3.52	Pengembangan Sistem
363	2.3.53	Pengembangan Sistem
364	2.3.54	Pengembangan Sistem
365	2.3.55	Pengembangan Sistem
366	2.3.56	Pengembangan Sistem
367	2.3.57	Pengembangan Sistem
368	2.3.58	Pengembangan Sistem
369	2.3.59	Pengembangan Sistem
370	2.3.60	Pengembangan Sistem
371	2.3.61	Pengembangan Sistem
372	2.3.62	Pengembangan Sistem
373	2.3.63	Pengembangan Sistem
374	2.3.64	Pengembangan Sistem
375	2.3.65	Pengembangan Sistem
376	2.3.66	Pengembangan Sistem
377	2.3.67	Pengembangan Sistem
378	2.3.68	Pengembangan Sistem
379	2.3.69	Pengembangan Sistem
380	2.3.70	Pengembangan Sistem
381	2.3.71	Pengembangan Sistem
382	2.3.72	Pengembangan Sistem
383	2.3.73	Pengembangan Sistem
384	2.3.74	Pengembangan Sistem
385	2.3.75	Pengembangan Sistem
386	2.3.76	Pengembangan Sistem
387	2.3.77	Pengembangan Sistem
388	2.3.78	Pengembangan Sistem
389	2.3.79	Pengembangan Sistem
390	2.3.80	Pengembangan Sistem
391	2.3.81	Pengembangan Sistem
392	2.3.82	Pengembangan Sistem
393	2.3.83	Pengembangan Sistem
394	2.3.84	Pengembangan Sistem
395	2.3.85	Pengembangan Sistem
396	2.3.86	Pengembangan Sistem
397	2.3.87	Pengembangan Sistem
398	2.3.88	Pengembangan Sistem
399	2.3.89	Pengembangan Sistem
400	2.3.90	Pengembangan Sistem
401	2.3.91	Pengembangan Sistem
402	2.3.92	Pengembangan Sistem
403	2.3.93	Pengembangan Sistem
404	2.3.94	Pengembangan Sistem
405	2.3.95	Pengembangan Sistem
406	2.3.96	Pengembangan Sistem
407	2.3.97	Pengembangan Sistem
408	2.3.98	Pengembangan Sistem
409	2.3.99	Pengembangan Sistem
410	2.3.100	Pengembangan Sistem